

## LAPORAN KEGIATAN

### RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

#### A. Pendahuluan

##### 1. Umum

Bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor TU.01/231/SJ-DAG.3/ND/1/2025 perihal Pembahasan Rancangan Permendag tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Perdagangan, maka diperlukan penugasan Pejabat dan Pegawai Biro Hukum pada rapat pembahasan dimaksud pada tanggal 31 Januari 2025 bertempat di Kantor Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Yogyakarta.

##### 2. Maksud dan Tujuan

Menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Permendag tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

##### 3. Ruang Lingkup

Rapat Pembahasan Rancangan Permendag tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

##### 4. Dasar

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; dan
- b. Surat Tugas Nomor HK.01.00/256/SJ-DAG.4/ST/01/2025 tanggal 21 Januari 2025.

#### B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Bahwa kegiatan Rapat Pembahasan Rancangan Permendag tentang Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Perdagangan dipimpin oleh Kepala Biro Keuangan dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Umum dan Layanan Pengadaan dan perwakilan dari Biro Hukum.

#### C. Hasil Yang Dicapai

- a) Pimpinan rapat menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini, pengelolaan BMN masih belum rapi sehingga dibutuhkan penatausahaan agar ke depannya lebih tertib administrasi.

- b) Bawa terdapat perubahan dalam Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan, antara lain:
  - Pasal 2 dimasukkan ke dalam BAB III Bagian Kesatu Umum, kemudian Bagian Kedua mengenai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara;
  - Pasal 4 ditambahkan mengenai Pelimpahan Kewenangan;
  - Pasal 16 dipindahkan ke dalam BAB II menjadi Pasal 4 baru; dan
  - Pasal 17 dihapuskan.
- c) Bawa Biro Umum menyampaikan terkait isu-isu pengelolaan BMN yang sampai dengan saat ini masih dalam pembahasan, yaitu terkait rencana sewa gedung kantor BPAP Bekasi dan BPAP Yogyakarta.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan dan tindaklanjut yang diperoleh dalam rapat sebagai berikut:

Biro Keuangan akan merapikan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sesuai dengan perubahan dimaksud dan akan mengirimkan kembali ke Biro Hukum pada kesempatan pertama.



